

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kecamatan Kerumutan

##### 1. Keadaan Umum Kecamatan Kerumutan

###### a. Geografis

Kecamatan Kerumutan terletak di bagian selatan wilayah Kabupaten Pelalawan dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Ukui, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Bandar Petalangan, dan Kecamatan Teluk Meranti. Selain berbatasan langsung dengan kecamatan-kecamatan lain di dalam Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Kerumutan juga berbatasan langsung dengan kabupaten lain yaitu Kabupaten Indragiri Hulu.

Kecamatan Kerumutan memiliki luas 960,03 km<sup>2</sup> atau sekitar 6,89 persen dari total wilayah Kabupaten Pelalawan. Sebagian wilayah adalah daratan (99,28 persen) yang didominasi berupa perkebunan kelapa sawit (38,22 persen) dan hutan rawa (56,22 persen).

Beberapa sungai besar mengalir di Kecamatan Kerumutan. Tercatat sebanyak tujuh buah sungai dengan panjang 1,12 km. Selain untuk penangkapan ikan, di beberapa wilayah sungai juga dijadikan sarana transportasi. Sungai terbesar adalah Sungai Kerumutan yang bermuara ke Sungai Kampar.

Kecamatan Kerumutan terbagi dalam 9 desa dan 1 kelurahan, yaitu kelurahan Kerumutan yang merupakan ibukota kecamatan Kerumutan. Desa dengan jarak terjauh antara ibukota desa/kelurahan dan ibukota kecamatan adalah

Desa Lipai Bulan dengan jarak 60 km, kemudian diikuti Desa Pangkalan Panduk dengan jarak 37 km.

Sedangkan jarak desa yang terdekat dengan ibukota Kecamatan Kerumutan adalah Desa Pematang Tinggi dengan jarak 12 km. Secara geografis desa/kelurahan di Kecamatan Kerumutan bertofografi dataran rendah sebanyak 6 desa, dan daerah aliran sungai sebanyak 4 desa

#### **b. Pemerintahan**

Kecamatan Kerumutan terdiri dari 10 desa/kelurahan dengan satu kelurahan yaitu Kelurahan Kerumutan dan 9 desa lainnya adalah Desa Bukit Lembah Subur, Banjar panjang, Beringin Makmur, Pematang Tinggi, Pangkalan Tampoi, Pangkalan Panduk, Tanjung Air Hitam, Mak Teduh dan Lipai Bulan.

Kecamatan Kerumutan terbagi dalam 30 dusun, 65 rukun warga (RW) dan 180 rukun tetangga (RT). Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, banyaknya kartu penduduk yang diterbitkan oleh Kecamatan Kerumutan pada tahun 2017 sebanyak 12.763 buah sedangkan tahun 2016 sebanyak 8.097 buah.

Di sisi lain, banyaknya akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kerumutan tahun 2017 sebanyak 5.231 buah. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2016 sebanyak 4.924 buah.

#### **c. Kependudukan**

Penduduk Kecamatan Kerumutan keadaan akhir tahun 2017 menurut proyeksi penduduk adalah 20.072 jiwa yang terdiri dari 10.224 laki-laki dan 9.848 perempuan.

Desa/Kelurahan dengan penduduk paling tinggi adalah Kelurahan Kerumutan dengan jumlah penduduk 5.790 jiwa atau dengan persentase 25,75 persen diikuti Desa Bukit Lembah Subur dengan jumlah penduduk 3.158 jiwa atau dengan persentase 14,05 persen. Sedangkan jumlah penduduk terendah adalah Desa Lipai Bulan dengan 441 jiwa atau 1,96 persen dari total penduduk Kecamatan Kerumutan.

#### **d. Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta sumberdaya pendukung dalam penciptaan kegiatan belajar mengajar membutuhkan perhatian lebih.

Tahun 2017 Kecamatan Kerumutan memiliki sarana pendidikan negeri dan swasta yaitu 11 unit sekolah TK, 21 unit Sekolah Dasar, 4 Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta 2 Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

#### **e. Kesehatan**

Kesehatan adalah kebutuhan dasar manusia, sehingga fasilitas kesehatan yang memadai serta biaya yang terjangkau merupakan hal penting yang harus dipikirkan pemerintah. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan semakin meningkat hal ini dilihat dari sudah adanya puskesmas di semua kecamatan.

Di Kecamatan Kerumutan belum terdapat rumah sakit dan rumah bersalin, namun sudah terdapat Poskesdes/Polindes sebanyak 7 unit, Puskesmas sebanyak 1 unit serta Pustu sebanyak 5 unit.

Untuk tenaga kesehatan, di Kecamatan Kerumutan terdapat 2 orang dokter dan semuanya bertugas di Kelurahan Kerumutan. Sedangkan bidan berjumlah 30 orang yang tersebar di semua desa/kelurahan. Alokasi bidan terbanyak di Kelurahan Kerumutan yaitu 17 orang.

Jumlah tenaga perawat tercatat sebanyak 11 orang. Sebanyak 8 perawat bertugas di Kelurahan Kerumutan, sementara terdapat 6 desa yang belum ada perawat.

#### **f. Perumahan**

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang masuk kategori papan. Rumah selain sarana berlindung dari gangguan luar, juga mempunyai fungsi sosial dan fungsi kesehatan yang penting dalam pembentukan kepribadian setiap anggota rumah tangga.

Secara umum, kualitas tempat tinggal penduduk Kecamatan Kerumutan berupa rumah permanen sekitar 33,56 persen, sementara semi permanen sekitar 29,56 persen, dan bukan permanen sekitar 36,88 persen.

Persentase jumlah tempat tinggal dengan kondisi lantai keramik di Kecamatan Kerumutan diperkirakan sebesar 28,95 persen sedangkan dengan kondisi lantai semen sekitar 45,55 persen serta kayu sebesar 24,95 persen. Sisanya lainnya sebesar 0,58 persen.

#### **g. Kelistrikan**

Tingkat elektrifikasi menunjukkan persentase keluarga yang memiliki fasilitas penerangan listrik. Secara umum di Kecamatan Kerumutan tingkat elektrifikasinya mencapai 92,87 persen.

Masih terdapat sebesar 7,13 persen keluarga yang belum mendapatkan akses penerangan listrik yang memadai di Kecamatan Kerumutan. Desa Beringin Makmur dan Pematang Tinggi menjadi wilayah yang paling besar nilai elektrifikasinya yaitu 100 persen.

Sementara Pangkalan Panduk tingkat elektrifikasinya terendah yaitu 57,39 persen Bahan bakar untuk memasak dikategorikan menjadi 3 yang utama yaitu gas, minyak tanah dan kayu bakar. Secara umum tingkat penggunaan gas sebagai bahan bakar memasak di Kecamatan Kerumutan sudah cukup tinggi. Persentase penggunaan gas mencapai 79,60 persen.

Sementara tingkat pemakaian bahan bakar minyak tanah sekitar 2,34 persen dan pemakaian kayu bakar sebagai bahan bakar memasak sekitar 18,06 persen. Penggunaan minyak tanah terus menurun karena konversi penggunaan bahan bakar

#### **h. Perekonomian**

Kecamatan Kerumutan merupakan kawasan agraris dengan komoditi terbesar adalah kelapa sawit dan karet. Sebanyak 86,77 persen warga berusaha di sektor pertanian. Desa dengan persentase tertinggi warganya berusaha di sektor pertanian adalah Kelurahan Kerumutan.

Selain sektor pertanian, sektor perdagangan juga menjadi salah satu sumber penghasilan utama warga Kerumutan yaitu 7,80 persen penduduk bekerja di sektor perdagangan.

Tahun 2017, Kecamatan Kerumutan telah memiliki 1 unit bank, 9 unit koperasi, 12 unit pasar yang tersebar hampir di seluruh desa/kelurahan. Jumlah toko/kios/warung juga cukup banyak yaitu 314 unit.

Sementara rumah makan dan penginapan belum ada di Kecamatan Kerumutan. Semakin banyaknya unit usaha akan mendorong pertumbuhan ekonomi Kecamatan Kerumutan.

#### **i. Transportasi**

Jalan menjadi sarana transportasi yang sangat penting untuk membuka akses khususnya bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau. Penyediaan jalan yang baik sangat mendukung kelancaran interaksi masyarakat sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Total panjang jalan di Kecamatan Kerumutan adalah 224,90 km. Sepanjang 22,80 km (10,14 persen) adalah jalan aspal, sepanjang 20,10 km (8,94 persen) jalan semen, sepanjang 64,00 (28,46 persen) jalan kerikil dan sepanjang 118,0 km (52,46 persen) jalan tanah.

Sarana transportasi sangat bermanfaat sebagai media untuk membawa orang/barang untuk melakukan kegiatan interaksi antar masyarakat. Pada tahun 2017 Kecamatan Kerumutan terdapat 15 unit bus, sebanyak 165 unit truk dan mobil pick up sebanyak 160 unit. Dengan kondisi wilayah yang dialiri sungai, angkutan air sangat dibutuhkan. Pada tahun 2017, terdapat 4 kapal motor, 2 speed boat, dan 7 sampan di Kecamatan Kerumutan.

## 2. Program PPIDK

### a. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud pelaksanaan Program PPIDK Mandiri adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat kecamatan dan desa;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan infrastruktur desa/kelurahan.

Tujuan pelaksanaan Program PPIDK Mandiri adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan peningkatan akses kepada masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum perempuan terhadap pelayanan infrastruktur desa/kelurahan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di desa/kelurahan untuk:
  1. Meningkatkan akses pemasaran dan atau mengurangi isolasi daerah;
  2. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat di desa/kelurahan;
  3. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat;

Sasaran pelaksanaan Program PPIDK Mandiri adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran utama Program adalah masyarakat miskin, hampir miskin dan kaum perempuan;
- b. Tersedianya infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa/kelurahan;

- c. Meningkatkan kemampuan berorganisasi masyarakat;
- d. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun dan memanfaatkan infrastruktur desa/kelurahan serta menimbulkan kesadaran untuk selalu memelihara infrastruktur yang ada;
- e. Mendorong terlaksananya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa/kelurahan yang dapat diterima oleh masyarakat, terbuka, dapat dipertanggungjawabkan dan berkelanjutan.

#### **b. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Program PPIDK Mandiri Tahun 2015 adalah kegiatan pembangunan infrastruktur desa/kelurahan yang mencakup:

- a. Jalan Lingkungan Desa/Kelurahan, adalah jalan yang melayani akses antar permukiman, dusun/lingkungan di dalam wilayah desa/kelurahan dan berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dengan kecepatan rata – rata rendah dan hanya untuk kendaraan – kendaraan kecil.
- b. Jalan Usaha Tani, adalah jalan yang merupakan akses dari jalan desa atau permukiman ke lahan usaha tani yang berfungsi sebagai sarana transportasi dalam pengangkutan sarana produksi pertanian, hasil panen dan alat mesin pertanian;
- c. Jembatan Sederhana, jembatan yang konstruksinya sangat sederhana yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan, seperti lembah yang dalam, alur sungai, danau, saluran irigasi, kali, jalan kereta api, jalan raya yang melintang

tidak sebidang, dan lain-lain, dan material yang digunakan dapat berupa besi, beton dan atau kayu dengan konstruksi dan teknis yang sederhana;

- d. Titian Plat Beton, bangunan titian yang lantainya terbuat dari plat beton bertulang dengan bidang yang arahnya horizontal dan beban yang bekerja tegak lurus untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan, seperti alur sungai kecil, drainase primer dan hanya untuk dilewati pejalan kaki dan kendaraan roda dua;
- e. Tambatan Perahu/Dermaga sederhana, merupakan tempat untuk menambatkan atau menyandarkan kapal/perahu dengan fungsi untuk membuka keterisolasian antara pulau, sehingga diharapkan akan terjadi interaksi ekonomi di antara pulau-pulau kecil;
- f. Box culvert, merupakan saluran tertutup yang dapat meminimalisir masuknya sampah maupun kontak dengan benda di atasnya sehingga aliran air bisa lebih lancar mengalir. Pembebanan Box Culvert tentu memperhatikan beban lalu lintas dan beban truk, karena fungsi dari box culvert adalah saluran yang bisa dilewati oleh kendaraan ataupun saluran yang ditempatkan di bawah tekanan tanah atau lainnya;
- g. Gorong-Gorong, adalah bangunan fisik yang dibangun memotong jalan yang berfungsi untuk penyaluran air;
- h. Sarana Air bersih, merupakan fasilitas yang berfungsi untuk memperoleh air bersih, seperti Sumur Bor, Sumur Gali Kerekan, Sumur Gali Pompa Mesin dan Jaringan Pipa Air Bersih;

- i. Ketenagalistrikan desa/kelurahan, adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik di desa/kelurahan;
- j. Drainase, adalah serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara maksimal;
- k. Bangunan gedung sederhana dan fasilitas publik lainnya.
  - 1. Bangunan Gedung Sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.
  - 2. Fasilitas Publik adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum, contoh: jalan, saluran air, jembatan, alat penerangan umum, jaringan listrik, tempat pembuangan sampah dan lain – lain.

Kegiatan yang tidak boleh didanai melalui Program PPIDK Mandiri Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik, kecuali pos - pos keamanan yang diperuntukan bagi kepentingan masyarakat itu sendiri;
- b. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah usia kerja;
- c. Pembiayaan pembuatan kebun desa;
- d. Pembiayaan ganti rugi tanah/lahan;
- e. Pembiayaan pengadaan bahan berbahaya seperti pestisida;

- f. Pembangunan serta renovasi sederhana bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah;
- g. Kegiatan apapun yang dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada izin tertulis dari instansi yang mengelola lokasi tersebut;
- h. Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan dan penggunaan terumbu karang;
- i. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai;
- j. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya lebih dari 50 hektar (ha);
- k. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha;
- l. Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar, lebih dari 10.000 meter kubik;

### **c. Dana Operasional**

Dana Operasional adalah dana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan/kelurahan yang diberikan kepada Tim Pembina Kabupaten, TPK dan KSM;

Dana Operasional Tim Pembina Kabupaten dipergunakan untuk Biaya Sosialisasi Program, Biaya Administrasi, Biaya Rapat, Biaya Pelatihan, Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Monitoring, Honor Tim Pembina Kabupaten, Honor Tim Pengendali Kecamatan, Honor Pelatih, Honor Narasumber, Honor KPP, Honor, dan Biaya Transportasi Pendamping;

Dana Operasional Tim Pengendali Kecamatan dipergunakan untuk Biaya Administrasi, Biaya Rapat, Biaya Monitoring dan Pengendalian Serta Biaya Perjalanan Dinas;

Dana Operasional KSM terdiri dari:

1. Khusus desa/kelurahan di Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Kuala Kampar sebesar maksimal 6% (enam perseratus) dari total alokasi Dana Bantuan Khusus dipergunakan untuk:
  - a. Sebesar maksimal 3,5% (tiga koma lima perseratus) dari total alokasi Dana Bantuan Khusus dipergunakan untuk Biaya Administrasi, Biaya Musyawarah, Biaya Transportasi, Biaya Pembuatan Papan Informasi dan Papan Kegiatan, Biaya Pelaporan mulai Tahap Persiapan, Perencanaan Program, Pelaksanaan Fisik sampai Pasca Pelaksanaan Fisik.
  - b. Sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari total alokasi Dana Bantuan Khusus dipergunakan untuk Biaya Perencanaan Kegiatan Fisik (Pembuatan DED dan RAB).
2. Desa/kelurahan selain di Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Kuala Kampar sebesar maksimal 5,5% (lima koma lima perseratus) dari total alokasi Dana Bantuan Khusus dipergunakan untuk:
  - a. Sebesar maksimal 3% (tiga perseratus) dari total alokasi Dana Bantuan Khusus dipergunakan untuk Biaya Administrasi, Biaya Musyawarah, Biaya Transportasi, Biaya Pembuatan Papan Informasi dan Papan Kegiatan, Biaya Pelaporan mulai Tahap Persiapan,

Perencanaan Program, Pelaksanaan Fisik sampai dengan Pasca Pelaksanaan Fisik.

- b. Sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari total alokasi Dana Bantuan Khusus dipergunakan untuk Biaya Perencanaan Kegiatan Fisik (Pembuatan DED dan RAB).

**d. Organisasi Pelaksana Program**

- (1) Tim Pembina Kabupaten berada di tingkat kabupaten, yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) TPK berada di tingkat kecamatan, yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- (3) KSM dan KPP yang berada di tingkat desa/kelurahan, yang keanggotaannya dipilih pada Musyawarah Desa/Kelurahan I dan diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- (4) Pendamping Kabupaten, yang terdiri dari:
  - a. Pendamping Kabupaten bertugas mengkoordinir pelaksanaan program di 12 kecamatan
  - b. Koordinator Wilayah berjumlah 3 orang yang masing-masing bertugas membantu Pendamping Kabupaten untuk mengkoordinir 4 kecamatan;
- (5) Pendamping Kabupaten sebagaimana pada ayat (4) bertanggungjawab kepada Bupati Melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pelalawan.
- (6) Pendamping Kabupaten sebagaimana pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (7) Pendamping Kecamatan dan PD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **e. Pelaporan, Pengawasan Dan Evaluasi**

##### **Pelaporan**

- (1) KSM selaku pelaksana utama Program PPIDK Mandiri di tingkat desa/kelurahan bertanggungjawab penuh secara formal dan material atas penggunaan dan pengelolaan Dana Bantuan Khusus yang diterimanya;
- (2) KSM dalam menjalankan tugasnya mendapatkan pendampingan dari PD yang dikoordinir oleh Pendamping Kecamatan;
- (3) KSM wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Penggunaan Dana kepada Kepala Desa/Lurah sekurang-kurangnya pada kondisi fisik mencapai bobot 30%, 60% dan 100%;

##### **Pengawasan dan Evaluasi**

- (1) Pengawasan terhadap KSM melalui jalur struktural dilakukan secara berjenjang, dimulai dan utama oleh Masyarakat Desa/Kelurahan di bawah koordinasi KPP, Pemerintah Desa/Kelurahan, Tim Pengendali Kecamatan, Tim Pembina Kabupaten. Pengawasan melalui jalur fungsional dilakukan secara berjenjang, dimulai dan utama oleh PD, Pendamping Kecamatan dan Pendamping Kabupaten;
- (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan atau Inspektorat Kabupaten Pelalawan dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan fisik yang telah dilaksanakan KSM sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

- (3) Evaluasi yang bertujuan untuk mencari solusi dan alternatif perbaikan pelaksanaan program dilakukan oleh semua pelaku program mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat kabupaten. Evaluasi yang bertujuan untuk memberikan penghargaan dan atau sanksi kepada kecamatan dan desa/kelurahan dilakukan oleh Tim Pembina Kabupaten yang dibantu oleh Pendamping Kabupaten;

Tabel IV.1 Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa/Kelurahan Tahun 2015

No.	Desa/Kelurahan	Jenis Pembangunan PPIDK	Jumlah Anggaran
1	Kerumutan	Drainase Semenisasi Jalan	Rp. 280.000.000,- Rp. 220.000.000,-
2	Desa Bukit Lembah Subur	Semenisasi Jalan	Rp. 400.000.000,-
3	Banjar Panjang	Semenisasi Jalan	Rp. 400.000.000,-
4	Beringin Makmur	Pembangunan Jalan	Rp. 400.000.000,-
5	Pematang Tinggi	Jaringan Listrik	Rp. 400.000.000,-
6	Pangkalan Tampoi	Jaringan Listrik	Rp. 400.000.000,-
7	Pangkalan Panduk	Jaringan Listrik Jembatan irigasi	Rp. 265.000.000,- Rp. 135.000.000,-
8	Tanjung Air Hitam	Jaringan Listrik	Rp. 400.000.000,-
9	Mak Teduh	Jaringan Listrik	Rp. 400.000.000,-
10	Lipai Bulan	Jaringan Listrik	Rp. 400.000.000,-

Sumber: Laporan PPIDK, 2016.



Pembangunan Jalan Aspal dan Box Culvert di Kecamatan Kerumutan tahun 2015



Pembangunan Pembukaan Jalan Baru dan Pemasangan Tiang Listrik di Kecamatan Kerumutan tahun 2015